

PENGARUH PELAKSANAAN ANGGARAN SEKOLAH DAN PENGENDALIAN INTERNAL TERHADAP KUALITAS KINERJA PELAYANAN PENDIDIKAN (STUDI DESKRIPTIF PADA SMK NEGERI DAN SWASTA DI KABUPATEN CIANJUR)

¹Amir Irul, ²Reni Nurlaela

^{1,2}Universitas Putra Indonesia, Jl. Raya Lubuk Begalung, Sumatera Barat

e-mail: ²irens.vans@yahoo.co.id

Abstract. This research is done to 143's State and Private Vocational High School in Regency of Cianjur in the year of 2015-2016 and aim to obtain the empirical evidence about the influence of school budget execution and internal control to performance quality service of education at State and Private Vocational High School in Regency of Cianjur. The major research data collection was done by questionnaire which is sent to each headmaster, school committee, and the senior teacher in each school. Data processing used Multiple Regression Analysis. The simultaneous test result showed that school budget execution and internal control simultaneously has positive and significant influence on the performance quality service of education at State and Private Vocational High School in Regency of Cianjur. The result of partial test showed that (1) There was positive and significant influence of school budget execution on the performance quality service of education at State and Private Vocational High School in Regency of Cianjur. (2) There was positive and significant influence of internal control on the performance quality service of education at State and Private Vocational High School in Regency of Cianjur.

Keywords: school budget execution, internal control, performance quality service of education

1. Pendahuluan

Peningkatan mutu pendidikan memegang peranan sangat penting dalam peningkatan sumber daya manusia dan dapat dikatakan bahwa masa depan bangsa terletak pada keberadaan pendidikan yang berkualitas pada masa kini untuk masa yang akan datang. Oleh karena itu upaya, peningkatan mutu sekolah merupakan titik sentral dan strategis dalam menciptakan pendidikan yang berkualitas, dinamis, mampu mandiri, dan menjadi proaktif.

Pembangunan pendidikan nasional tidak dapat lepas dari perkembangan lingkungan strategis, baik nasional maupun global. Pendidikan harus dibangun dalam keterkaitannya secara fungsional dengan berbagai bidang kehidupan, yang masing-masing memiliki persoalan dan tantangan semakin kompleks. Pengembangan sistem pendidikan pada saat ini diarahkan kepada satu tujuan yang jelas, yakni kualitas pendidikan secara menyeluruh.

Walaupun berbagai upaya pembangunan pendidikan terus dilakukan dan ditingkatkan, disadari bahwa pembangunan pendidikan belum sepenuhnya mencapai hasil sesuai dengan yang diharapkan. Dalam rangka penyediaan layanan pendidikan untuk memperluas akses dan meningkatkan pemerataan layanan pendidikan walaupun berbagai upaya terus-menerus dilakukan, tetapi layanan pendidikan belum sepenuhnya menjangkau seluruh lapisan masyarakat, khususnya yang tinggal di daerah perdesaan,

wilayah terpencil, dan kepulauan yang secara geografis sulit dijangkau sehingga belum semua penduduk usia sekolah dapat memperoleh akses pendidikan dengan baik. Kendala geografis dan kondisi ekonomi masyarakat juga merupakan faktor fundamental munculnya kesenjangan partisipasi pendidikan di berbagai lapisan masyarakat.

Konsep reposisi pendidikan kejuruan merupakan salah satu model penataan dan pengembangan pendidikan kejuruan yang didasarkan atas kajian permasalahan tentang perekonomian dan ketenagakerjaan di wilayah. Dalam pelaksanaannya pemerintah pusat dalam hal ini Kementerian Pendidikan Nasional sebagai penanggungjawab teknis menguraikannya menjadi 3 pilar utama: (1) pemerataan dan perluasan akses pendidikan. (2) peningkatan mutu, relevansi dan daya saing, serta (3) penguatan tata kelola, akuntabilitas dan pencitraan publik. Dikaitkan dengan permasalahan di atas maka 3 pilar tersebut sangat relevan sekali dengan reposisi pendidikan menengah kejuruan.

Sejak digulirkannya kebijakan pengembangan SMK, hingga kini di Kabupaten Cianjur terdapat sebanyak 143 SMK yang terdiri atas 31 SMK Negeri dan 112 SMK Swasta yang tersebar di 32 kecamatan. Jumlah ini, meskipun belum mencapai taraf perbandingan 70%:30% dengan jumlah SMA, sudah menunjukkan pertumbuhan yang relatif cukup besar. Pertumbuhan SMK ini telah menjangkau hampir seluruh kecamatan yang ada di kabupaten Cianjur sehingga dapat memberikan banyak pilihan bagi warga masyarakat dalam menentukan jenjang pendidikan.

Bagi sebagian satuan pendidikan kondisi ini menumbuhkan sebetulnya persaingan dalam menarik masyarakat pengguna jasa pendidikan. Kondisi persaingan untuk menarik masyarakat pengguna jasa pendidikan ini tidak jarang menggunakan berbagai cara yang dapat dikategorikan menyimpang dari tujuan pengelolaan pendidikan yang sesungguhnya. Tidak sedikit sekolah (dalam hal ini SMK swasta) yang berusaha menarik siswa sebanyak-banyaknya demi nilai keuntungan secara finansial. Tidak jarang pula upaya menarik siswa sebanyak-banyaknya ini tidak diimbangi dengan pelayanan pendidikan yang selayaknya. Selama proses pembelajaran yang berlangsung di sekolah tidak menyimpang dari kurikulum yang ditetapkan pemerintah, maka pendidikan yang dilaksanakan di sekolah tersebut dapat dianggap baik. Akan tetapi, tidak sedikit pula SMK yang berusaha meningkatkan kualitas pelayanan pendidikan semata-mata karena menghendaki produknya berkualitas sehingga dapat diterima di dunia usaha dan dunia industri. Sekolah-sekolah ini biasanya menerapkan standar pelayanan pendidikan secara ketat dengan disertai dengan pelaksanaan anggaran sekolah dan pengendalian secara internal.

2. Kajian Teoretis

2.1 Pelaksanaan Anggaran Sekolah

Keuangan dan pembiayaan merupakan salah satu sumber daya yang secara langsung menunjang efektifitas dan efisiensi pengelolaan pendidikan. Hal tersebut lebih terasa lagi dalam implementasi MBS (Manajemen Berbasis Sekolah), yang menuntut kemampuan sekolah untuk merencanakan, melaksanakan dan mengevaluasi serta mempertanggungjawabkan pengelolaan dana secara transparan kepada masyarakat dan pemerintah.

Pada dasarnya manajemen anggaran meliputi tiga tahap yaitu (1) pengadaan anggaran, (2) penggunaan anggaran, (3) pertanggungjawaban anggaran. Sebagaimana dikemukakan di atas bahwa sumber-sumber pengadaan anggaran pada tingkat satuan pendidikan SMK terdiri atas biaya satuan pendidikan (BSP) investasi dan operasional.

BSP operasional diperoleh melalui berbagai sumber yang diperbolehkan berdasarkan peraturan yang berlaku. Salah satu di antaranya adalah bantuan operasional sekolah (BOS) yang diperoleh dari pusat, dari provinsi, serta dari APBD kabupaten/kota.

Ahmad Sanusi (2002:91) menyatakan bahwa penggunaan anggaran dan keuangan didasarkan pada prinsip-prinsip (1) efisien dalam arti hemat, tidak mewah, dan sesuai dengan kebutuhan teknis yang disyaratkan, (2) efektif dalam arti terarah dan terkendali sesuai dengan rencana, program/ kegiatan, (3) keharusan penggunaan kemampuan/hasil produksi dalam negeri sejauh ini dimungkinkan.

Umaedi (2000:26-28) mengemukakan lima belas karakteristik pelaksanaan manajemen peningkatan mutu berbasis sekolah. Dari lima belas karakteristik di atas, beberapa di antaranya berkaitan langsung dengan pelaksanaan anggaran di tingkat sekolah. Karakteristik tersebut adalah (1) keterbukaan atau transparansi, (2) akuntabilitas, (3) evaluasi dan perbaikan secara berkelanjutan, (4) responsif dan antisipatif terhadap kebutuhan, serta (5) memiliki kemampuan menjaga keberlanjutan (konsistensi).

Berdasarkan ketiga teori yang dikemukakan di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa pelaksanaan anggaran di tingkat satuan pendidikan SMK harus berada pada kerangka sebagai berikut.

1. Konsistensi pelaksanaan anggaran.
2. Efektivitas penggunaan anggaran yang mengandung arti terarah dan terkendali sesuai dengan rencana.
3. Memiliki fleksibilitas dalam arti memodifikasi perencanaan yang telah disusun ke arah yang lebih baik dan dapat dipertanggungjawabkan apabila timbul permasalahan yang tidak dapat diprediksi sebelumnya.
4. Memiliki akuntabilitas dan transparansi tinggi.
5. Melakukan pengawasan dan evaluasi secara berkelanjutan.
6. Melakukan perbaikan dan pelaporan secara berkelanjutan.

2.2 Pengendalian Internal

Pengawasan atau pengendalian internal dalam teori akuntansi dan organisasi didefinisikan sebagai proses yang dipengaruhi oleh sumber daya manusia dan sistem teknologi informasi, yang dirancang untuk membantu organisasi mencapai suatu tujuan atau objektif tertentu. Pengendalian internal merupakan suatu cara untuk mengarahkan, mengawasi, dan mengukur sumber daya suatu organisasi. Ia berperan penting untuk mencegah dan mendeteksi penggelapan (*fraud*) dan melindungi sumber daya organisasi baik yang berwujud (seperti mesin dan lahan) maupun tidak (seperti reputasi, hak kekayaan intelektual, atau merek dagang).

Pengendalian intern mencakup rencana organisasi dan semua metode serta tindakan yang telah digunakan dalam perusahaan untuk mengamankan aktivitya, mengecek kecermatan dan keandalan dari data akuntansinya, memajukan efisiensi operasi, dan mendorong ketaatan pada kebijaksanaan-kebijaksanaan yang telah ditetapkan pimpinan (Schermerhorn et.al., 2003:155).

Menurut *Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission* (COSO), sebagaimana dikutip oleh Tuanakotta (1982:29):

“Internal controls are the tools that managers use (but are often not taught) to help achieve their business objective in the following categories :

1. *Effectiveness and efficiency of operations*
2. *Reliability of financial reporting*

3. *Compliance with external laws and regulations*”

The Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission (COSO) mengeluarkan panduan monitoring sistem internal kontrol. Panduan tersebut bertujuan untuk melakukan monitoring efektivitas sistem internal kontrol dan mengambil langkah-langkah perbaikan yang diperlukan. Panduan monitoring sistem internal kontrol yang terdiri atas 5 (lima) komponen dengan 26 subkomponen sebagaimana diuraikan berikut ini.

1. Lingkungan Pengendalian, terdiri atas (a) integritas dan nilai etika; (b) komitmen pada kompetensi; (c) filosofis manajemen dan gaya operasi; (d) struktur organisasi; (e) penetapan otoritas dan pertanggungjawaban; (f) kebijakan dan prosedur sumber daya manusia.
2. Penilaian Risiko, terdiri atas (a) perumusan tujuan secara keseluruhan; (b) perumusan tujuan instansi pada tingkat kegiatan; (c) identifikasi risiko; (d) analisis risiko; dan (e) mengelola risiko.
3. Aktivitas Pengendalian, terdiri atas (a) review pencapaian kinerja utama instansi pemerintah oleh jajaran pimpinan instansi pemerintah yang bersangkutan; (b) pembinaan SDM untuk mencapai hasil yang diharapkan; (c) pemrosesan informasi; (d) pengendalian fisik aset rawan untuk menjaga dan mengamankan aset yang rawan; (e) penetapan dan pemantauan indikator dan ukuran kinerja; (f) pemisahan tugas dan tanggung jawab penting di antara pegawai yang berbeda untuk mengurangi kesalahan, pemborosan, atau kecurangan; (g) pelaksanaan transaksi dan kejadian berdasarkan otorisasi dan dilaksanakan oleh pengawas yang layak; (h) pencatatan transaksi dan kejadian penting lainnya diklasifikasi dan dicatat secara layak; (i) pembatasan akses dan pertanggungjawaban atas sumber daya dan pertanggungjawaban atas penyimpanan dicatat; (j) pengendalian intern dan semua transaksi dan kejadian penting lainnya didokumentasikan dengan jelas.
4. Informasi dan Komunikasi, terdiri atas (a) informasi; (b) komunikasi.
5. Monitoring, terdiri atas (a) monitoring kegiatan yang sedang berjalan; (b) evaluasi yang terpisah; dan (c) tindak lanjut atas temuan audit.

(COSO dari www.siswaktu.com/internal_control.pdf (on-line) - 28 Mei 2016)

2.3 **Kualitas Kinerja Pelayanan Pendidikan**

Sedarmayanti (2007) menyatakan bahwa kinerja merupakan sistem yang digunakan untuk menilai dan mengetahui apakah seorang karyawan telah melaksanakan pekerjaannya secara keseluruhan, atau merupakan perpaduan dari hasil kerja (apa yang harus dicapai seseorang) dan kompetensi (bagaimana seseorang mencapainya).

Mengacu kepada kandungan Permendiknas Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan dan Permendiknas Nomor 63 Tahun 2009 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan, standar pelayanan pendidikan memiliki dimensi sebagai berikut.

1. Pemenuhan standar isi
2. Pemenuhan standar proses
3. Pemenuhan standar kompetensi lulusan
4. Pemenuhan standar pendidik dan tenaga kependidikan
5. Pemenuhan standar sarana dan prasarana
6. Pemenuhan standar pengelolaan pendidikan
7. Pemenuhan standar pembiayaan
8. Pemenuhan standar penilaian pendidikan.

9. (Pasal 18 ayat 1 Permendiknas Nomor 63 Tahun 2009)

3. Hasil Penelitian dan Pembahasan

3.1 Pengaruh Pelaksanaan Anggaran Sekolah dan Pengendalian Internal terhadap Kualitas Kinerja Pelayanan Pendidikan

Berdasarkan hipotesis yang diajukan, teknik analisis data dengan menggunakan Analisis Regresi Berganda dan bantuan aplikasi SPSS 18.0 for Windows diperoleh model regresi sebagai berikut.

$$\hat{Y} = 14,923 + 0,276X_1 + 0,778X_2$$

Untuk membuktikan apakah model regresi yang telah diperoleh di atas dapat digunakan atau tidak, akan dilakukan pengujian hipotesis secara simultan dengan menggunakan uji F.

Hipotesis yang diajukan pada pengujian ini adalah sebagai berikut.

$H_0 : \beta_i = 0$ Tidak terdapat pengaruh pelaksanaan anggaran sekolah dan pengendalian internal secara bersama-sama terhadap kualitas kinerja pelayanan pendidikan.

$H_A : \beta_i \neq 0$ Terdapat pengaruh pelaksanaan anggaran sekolah dan pengendalian internal secara bersama-sama terhadap kualitas kinerja pelayanan pendidikan.

Uji statistik yang digunakan adalah uji F dengan menggunakan *SPSS 18.0 for Windows* diperoleh output hasil analisis nilai F_{hitung} sebesar 54,184 dan p-value sebesar 0,000. Dengan membandingkan nilai F_{hitung} dengan nilai F_{tabel} diketahui bahwa nilai F_{hitung} yang diperoleh adalah 54,184 sedangkan nilai F_{tabel} pada derajat kebebasan (2;70) dan α (tingkat kekeliruan) 0,05 adalah 3,134. Oleh karena itu tampak bahwa nilai F_{hitung} jauh lebih besar daripada F_{tabel} ($54,184 > 3,134$), sehingga dapat diambil kesimpulan bahwa H_0 ditolak dan H_A diterima. Selanjutnya, melalui membandingkan nilai signifikansi dengan nilai alpha diketahui bahwa nilai signifikansi yang diperoleh adalah 0,000 sedangkan α (tingkat kekeliruan) yang diambil adalah 0,05. Karena nilai signifikansi lebih kecil daripada nilai alpha maka H_0 ditolak dan menerima H_A .

Kedua cara pengambilan keputusan tersebut di atas ternyata memberikan hasil yang sama, yaitu sama-sama menolak H_0 dan menerima H_A . Dengan demikian, pada tingkat kepercayaan 95% ($\alpha = 5\%$ atau 0,05) terdapat pengaruh positif dan signifikan bahwa variabel pelaksanaan anggaran sekolah (X_1) dan pengendalian internal (X_2) terhadap kualitas kinerja pelayanan pendidikan (Y) pada SMK Negeri dan Swasta di Kabupaten Cianjur. Oleh karena itu, model regresi berganda yang digunakan bermakna.

Besarnya pengaruh secara bersama-sama pelaksanaan anggaran sekolah (X_1) dan pengendalian internal (X_2) terhadap kualitas kinerja pelayanan pendidikan (Y) pada SMK Negeri dan Swasta di Kabupaten Cianjur dapat dilihat dari koefisien determinasi (R^2). Nilai koefisien determinasi (R square) adalah sebesar 0,608. Nilai ini mengandung makna bahwa sebesar 60,80 % perubahan kualitas kinerja pelayanan pendidikan (Y) pada SMK Negeri dan Swasta di Kabupaten Cianjur dapat dijelaskan (dipengaruhi) oleh pelaksanaan anggaran sekolah (X_1) dan pengendalian internal (X_2). Sedangkan sisanya sebesar 39,20 % merupakan pengaruh faktor lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini.

3.2 Pengaruh Pelaksanaan Anggaran Sekolah terhadap Kualitas Kinerja Pelayanan Pendidikan

Hasil perhitungan untuk nilai t_{hitung} untuk X_1 adalah sebesar 3,871 sedangkan t_{tabel} pada α (tingkat kekeliruan) 0,05 dan $db = 59 - 2 = 57$ untuk pengujian satu sisi adalah 1,676. Kriteria pengujian satu sisi adalah 'tolak H_0 jika $t_{hitung} > t_{tabel}$ '. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa pada tingkat kepercayaan 95% terdapat pengaruh pelaksanaan anggaran sekolah terhadap kualitas kinerja pelayanan pendidikan pada SMK Negeri dan Swasta di Kabupaten Cianjur.

Besar pengaruh antar kedua variabel dinunjukkan dengan koefisien determinasi untuk variabel Kualitas kinerja pelayanan pendidikan (Y) dan pelaksanaan anggaran sekolah (X_1) adalah 0,384. Dengan mengontrol variabel X_2 , nilai ini mengandung makna bahwa sebesar 38,40 % perubahan kualitas kinerja pelayanan pendidikan (Y) pada SMK Negeri dan Swasta di Kabupaten Cianjur dipengaruhi oleh pelaksanaan anggaran sekolah (X_1). Sedangkan sisanya sebesar 61,60 % merupakan pengaruh faktor lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini.

3.3 Pengaruh Pengendalian Internal terhadap Kualitas Kinerja Pelayanan Pendidikan

Berdasarkan tabel 2 juga dapat diketahui bahwa nilai t_{hitung} untuk X_2 adalah 2,271 sedangkan t_{tabel} pada α (tingkat kekeliruan) 0,05 dan $db = 59 - 2 = 57$ untuk pengujian satu sisi adalah 1,676. Kriteria pengujian satu sisi adalah 'tolak H_0 jika $t_{hitung} > t_{tabel}$ '.

Karena nilai t_{hitung} (2,271) lebih besar daripada nilai t_{tabel} (1,671) pada tingkat kekeliruan 5% dan $db = 50$, maka H_0 ditolak. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa pada tingkat kepercayaan 95% terdapat pengaruh pengendalian internal terhadap kualitas kinerja pelayanan sekolah pada SMK Negeri dan Swasta di Kabupaten Cianjur.

Besar pengaruh antar kedua variabel dinunjukkan oleh koefisien determinasi untuk variabel kualitas kinerja pelayanan pendidikan (Y) dan pengendalian internal (X_2) adalah 0,579. Dengan mengontrol variabel X_1 , nilai ini mengandung makna bahwa sebesar 57,90 % perubahan kualitas kinerja pelayanan pendidikan (Y) pada SMK Negeri dan Swasta di Kabupaten Cianjur dipengaruhi oleh pengendalian internal (X_2). Sedangkan sisanya sebesar 42,10 % merupakan pengaruh faktor lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini.

4. Kesimpulan

1. Pelaksanaan anggaran sekolah dan pengendalian internal secara simultan berpengaruh terhadap kualitas kinerja pelayanan pendidikan pada SMK Negeri dan Swasta di Kabupaten Cianjur. Koefisien korelasi ganda yang dihasilkan adalah $(r_{x_1x_2y}) = 0,779$ dengan koefisien determinasi $(r_{x_1x_2y}^2) = 0,608$ yang berarti bahwa 60,80 % proporsi kualitas kinerja pelayanan pendidikan dapat dijelaskan secara bersama-sama oleh kedua variabel bebas yang dikaji dalam penelitian ini. Hal ini menunjukkan bahwa dengan adanya pelaksanaan anggaran sekolah yang baik dan pengendalian internal yang tinggi secara bersama-sama akan dapat meningkatkan kualitas kinerja pelayanan pendidikan pada SMK Negeri dan Swasta di Kabupaten Cianjur. Persamaan regresi yang menunjukkan hubungan antara kedua variabel bebas secara bersama-sama dengan variabel kualitas

kinerja pelayanan pendidikan ditunjukkan oleh model regresi ganda $\hat{Y} = 14,923 + 0,276X_1 + 0,778X_2$.

2. Pelaksanaan anggaran sekolah secara parsial berpengaruh terhadap kualitas kinerja pelayanan pendidikan pada SMK Negeri dan Swasta di Kabupaten Cianjur. Koefisien korelasi kedua variabel (r_{y1}) sebesar 0,619 dan koefisien determinasi (r_{xy1}) sebesar 0,384 mengandung makna bahwa secara terpisah proporsi varian kualitas kinerja pelayanan pendidikan dipengaruhi oleh pelaksanaan anggaran sekolah sebesar 38,40 %. Hal ini menunjukkan bahwa dengan adanya pelaksanaan anggaran sekolah yang baik akan dapat meningkatkan kualitas kinerja pelayanan pendidikan pada SMK Negeri dan Swasta di Kabupaten Cianjur.
3. Pengendalian internal secara parsial berpengaruh terhadap kualitas kinerja pelayanan pendidikan pada SMK Negeri dan Swasta di Kabupaten Cianjur. Koefisien korelasi kedua variabel (r_{y2}) adalah 0,761 dengan koefisien determinasi (r_{zy1}) sebesar 0,579. Hal ini mengandung makna bahwa secara terpisah proporsi varian kualitas kinerja pelayanan sekolah dipengaruhi oleh pengendalian internal sebesar 57,90 %. Hal ini menunjukkan bahwa dengan adanya pengendalian internal yang tinggi terhadap warga sekolah (guru dan staf tata usaha) akan dapat meningkatkan kualitas kinerja pelayanan pendidikan pada SMK Negeri dan Swasta di Kabupaten Cianjur.

Daftar pustaka

- Ahmad Sanusi 2002. *Sistem Manajemen Pendidikan di Indonesia*. Bandung: Radjawali Press.
- Lembar Negara. *Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan*. Jakarta: BSNP.
- Lembar Negara. *Perturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Sekolah*.
- Mahsun, M. 2006. *Pengukuran Kinerja Sektor Publik*, Yogyakarta: BPFE Yogyakarta.
- Natzir, Mohammad. 2008. *Metode Penelitian*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Sallis, Edward. 2006. *Total Quality Management in Education*, Third edition. London: Kogan Page Ltd.
- Schermerhorn, John R., Hunt, James G., and Osborn, Richard N., 2003, *Managing Organizational Behavior*. New York: John Willey & Son.
- Sedarmayanti. 2007. *Membangun Sistem Manajemen Kinerja Guna Meningkatkan Produktivitas Menuju Good Governance*. Bandung: Mandar Maju.
- Sutermeister, R.A, 1999. *People and Productivity*. Toronto: Mc. Graw Hill Book. Co.
- Tuanakotta, T. M. 1982. *Auditing: Petunjuk Pemeriksaan Akuntan Publik*, Edisi ketiga, Jakarta: Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia.
- Turney, Clifford. *et. al.* (2013). *Educational Management Roles and Tasks: The School Manager*, Sydney. 5th Edition. Australia: Allen & Unwin Pty. Ltd. Napier Street, North Sydney, NSW 2059.
- Umaedi. 2000. *Konsep Dasar MPMBS*. Jakarta: Depdiknas.